

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Profil dan
Kebijakan
Teknis
Inspektorat
Jenderal
Kementerian
Pertanian

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS INSPEKTORAT

JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan bebas dari KKN pada Kementerian Pertanian melalui pengawasan yang efektif dan akuntabel. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jalan Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan memiliki pegawai sebanyak 287 orang mempunyai tugas dan fungsi sebagai *Quality Assurance* dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian. Melalui kebijakan pengawasan yang lebih bersifat preventif, dan pre-emptif adanya kesalahan maupun terjadinya penyimpangan akan terdeteksi secara dini. Melalui peran Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diharapkan tujuan dan sasaran kegiatan pembangunan pertanian dapat dicapai secara efektif dan efisien. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada Permentan No. 43 Tahun 2014 terdiri dari Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat IV dan Inspektorat Investigasi.

A. 1.1 VISI DAN MISI INSPEKTORAT JENDERAL

1. VISI

Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian serta sebagai suatu tujuan atau cita-cita bersama di masa yang akan datang, Inspektorat Jenderal menetapkan visi yaitu ***"Menjadi pengawas Intern mitra proaktif pengelola program pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani"***.

2. MISI

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, Inspektorat Jenderal mengemban misi yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas program pembangunan pertanian dalam rangka kedaulatan pangan.
- b. Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementerian Pertanian secara efektif.
- c. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal.

A.1.2. TUJUAN

Dari serangkaian misi yang diemban oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tersebut, tujuan kegiatan pengawasan adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas pembangunan pertanian dalam rangka kedaulatan pangan.
2. Meningkatkan kematangan (maturitas) penerapan SPIP di lingkungan Kementerian Pertanian.
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal.

A.1.3. SASARAN

Berdasarkan visi, misi dan tujuan diatas, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menetapkan sasaran pengawasan intern sebagai berikut :

1. Meningkatkan Indeks akuntabilitas pembangunan pertanian
2. Meningkatkan nilai maturitas penerapan SPI Kementerian Pertanian
3. Meningkatkan Internal Audit Capability Model (IA-CM) Inspektorat Jenderal.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Audited Itjentan Tahun Anggaran 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Instansi yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah Sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik Negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Audited Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian per 31 Desember 2018 ini merupakan laporan konsolidasi dari satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan, yang secara struktural berada di bawah Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Jumlah satuan kerja di lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian adalah satu satuan kerja yaitu satker Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Inspektorat Jenderal menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat peristiwa dan transaksi itu terjadi, tanpa memperhatikan

saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar
Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian

Pertanian adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pendapatan LO pada Inspektorat Jenderal adalah Pendapatan Denda dan Pendapatan lainnya.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan

penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah,

jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang
Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai yang tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman pada KMK No.620/KM.6/2015 tentang masa manfaat dalam rangka Amortisasi BMN berupa Aset Tak Berwujud (ATB) pada entitas Pemerintah Pusat .
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di

Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%

Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

*Penyusutan
Aset Tetap*

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan

metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos- pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun- akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah mengadakan 6 kali revisi POK. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Realisasi
Pendapatan Negara
dan Hibah
Rp114.127.113,00

B.1. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode 31 Desember 2018 adalah senilai Rp114.127.113,00 atau mencapai 760,85 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan senilai Rp15.000.000,00. Pendapatan Negara dan Hibah Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian merupakan PNBP yang terdiri dari Pendapatan Lelang, Pendapatan dari pelunasan TGR, Pendapatan Denda dan Pendapatan Lain-lain.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tidak memiliki potensi PNBP, sehingga estimasi pendapatan tahun 2018 hanya ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00, berdasarkan perkiraan perhitungan pelaksanaan lelang BMN dan pendapatan dari pelunasan TP/TGR, namun karena adanya belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang cukup besar sehingga pendapatan per 31 Desember 2018 mencapai 760,85 persen.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya adalah sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2018

Akun	Uraian	31 Desember 2018	
		Estimasi Pendapatan	Realisasi
4232	Pendapatan Jasa lainnya	15,000,000	-
4251	Pendapatan dan Penjualan, Pengelolaan BMN, dan luran Badan	-	22,785,000
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan pengelolaan Keuangan	-	7,670,000
4258	Pendapatan Denda	-	17,944,108
4259	Pendapatan lain -lain	-	65,728,005
Total		15,000,000	114,127,113

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah per 31 Desember 2018 senilai Rp114.127.113,00, yang terdiri dari :

- a. Pendapatan dari Pengelolaan BMN senilai Rp22.785.000,00 yaitu:
 - Pendapatan Lelang peralatan dan mesin berupa inventaris kantor yang kondisinya sudah rusak berat senilai Rp10.500.000,00, dengan Risalah Lelang Nomor 160/26/2018 tanggal 30 April 2018.
 - Pendapatan Lelang peralatan dan mesin berupa inventaris kantor yang kondisinya sudah rusak berat senilai Rp3.000.000,00, dengan Risalah Lelang Nomor 039/26/2018 tanggal 8 Februari 2018.
 - Pendapatan Lelang peralatan dan mesin berupa inventaris kantor yang kondisinya sudah rusak berat senilai Rp9.285.000,00, dengan Risalah Lelang Nomor 469/26/2018 tanggal 22 November 2018.
- b. Pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai senilai Rp7.670.000,00
- c. Pendapatan denda senilai Rp17.944.108,00
- d. Pendapatan lain lain senilai Rp65.728.005,00 terdiri dari :
 - Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) senilai Rp48.767.197,00
 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) senilai Rp16.873.664,00
 - Pendapatan anggaran lain lain senilai Rp87.144,00

Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

URAIAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan / Penurunan	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Pendapatan dan pemindahtanganan BMN lainnya	22,785,000	62,188,000	(39,403,000)	(63.36)
Pendapatan Penyelesaian Ganti kerugian Negara Terhadap Pegawai	7,670,000	-	7,670,000	100.00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	17,944,108	1,314,551	16,629,557	1265.04
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	48,767,197	12,941,112	35,826,085	276.84
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	16,873,664	2,900,000	13,973,664	481.85
Pendapatan Anggaran Lain-lain	87,144	67	87,077	129965.67
	Rp 114,127,113	Rp 79,343,730	34,783,383	43.84

Berdasarkan Tabel diatas Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian per 31 Desember 2018 mengalami peningkatan senilai Rp34.783.383,00 atau 43,84% jika dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2018 terdapat pelunasan TGR senilai Rp10.310.000,00 dan peningkatan nilai pendapatan yang cukup besar pada pendapatan lain-lain, denda keterlambatan pekerjaan, penerimaan kembali belanja Pegawai TAYL (terdapat pengembalian kelebihan belanja uang makan bulan Desember 2017 senilai Rp33.745.900,00) dan penerimaan kembali belanja Barang TAYL. Pada Tahun 2018 tidak terdapat Realisasi Pengembalian Pendapatan.

Realisasi Belanja
Negara
Rp91.872.402.577,00

B.2. BELANJA

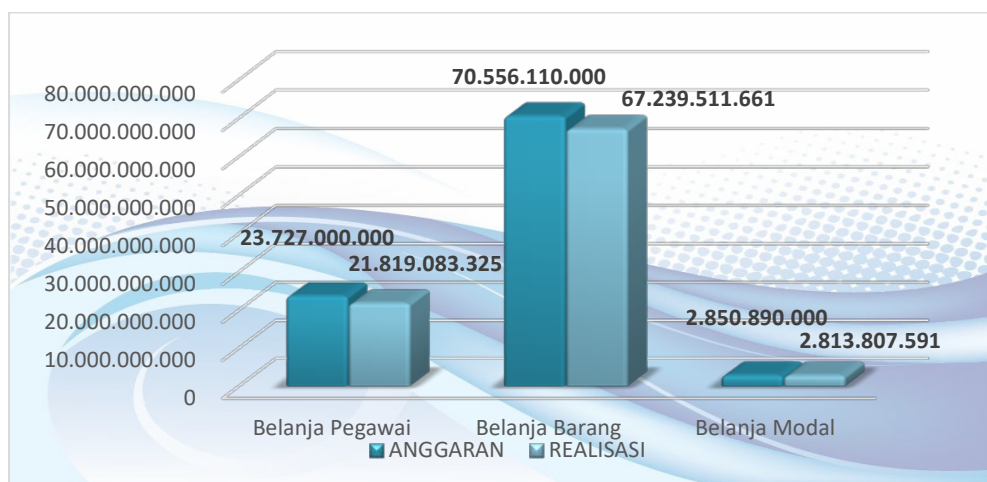
Realisasi Belanja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (netto) per 31 Desember 2018 senilai Rp91.872.402.577,00 atau 94,58% dari anggaran senilai Rp97.134.000.000,00 setelah dikurangi pengembalian belanja senilai Rp375.341.496,00. Dan Capaian Output Kegiatan per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada lampiran laporan keuangan (kode laporan lap.output)

Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2018

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
51	Belanja Pegawai	23,727,000,000	21,832,841,523	92.02
52	Belanja Barang	70,556,110,000	67,601,094,959	95.81
53	Belanja Modal	2,850,890,000	2,813,807,591	98.70
Total Belanja Kotor (Bruto)		97,134,000,000	92,247,744,073	94.97
Pengembalian Belanja			(375,341,496)	
Total Belanja Bersih (Netto)		97,134,000,000	91,872,402,577	94.58

Komposisi anggaran dan realisasi belanja (Netto) per 31 Desember 2018 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Perbandingan Realisasi Belanja

Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

KODE	URAIAN	REALISASI BELANJA (Rp)		KENAIKAN / PENURUNAN	
		31 Desember 2018	31 Desember 2017	Rp	%
51	Belanja Pegawai	21,819,083,325	20,998,298,955	820,784,370	3.91
52	Belanja Barang	67,239,511,661	62,752,985,113	4,486,526,548	7.15
53	Belanja Modal	2,813,807,591	1,969,604,047	844,203,544	42.86
Jumlah Belanja		91,872,402,577	85,720,888,115	6,151,514,462	7.18

Realisasi Belanja (Netto) yang berakhir 31 Desember 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp6.151.514.462,00 atau 7,18% dibandingkan realisasi per 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan karena realisasi belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar 3,91% karena adanya penambahan pegawai baru, kenaikan jabatan Fungsional Auditor dan inpasing dari Fungsional Umum menjadi Fungsional Tertentu. Selain itu juga kenaikan realisasi belanja per 31 Desember disebabkan peningkatan pada belanja barang sebesar 7,15% yang antara lain disebabkan adanya kenaikan satuan biaya perjalanan dinas dan peningkatan volume kegiatan dan peningkatan realisasi belanja modal yang disebabkan adanya penambahan alokasi belanja modal penunjang kegiatan pengawasan antara lain pengadaan aplikasi E-Pengawasan.

Belanja Pegawai
Rp21.819.083.325,00

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai (netto) adalah Realisasi Belanja Pegawai pertanggal laporan setelah dikurangi pengembalian belanja pegawai.

Realisasi Belanja Pegawai (netto) per 31 Desember 2018 senilai Rp21.819.083.325,00 atau sebesar 91,96% dari Pagu Anggaran senilai Rp23.727.000.000,00.

Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Berdasarkan Sub Kelompok Belanja per 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	15,595,287,000	14,992,970,700	96.14
Belanja Pembulatan Gaji PNS	240,000	202,496	84.37
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1,145,000,000	1,102,343,118	96.27
Belanja Tunjangan anak PNS	360,000,000	326,612,536	90.73
Belanja Tunjangan Struktural PNS	518,840,000	508,760,000	98.06
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1,925,050,000	1,899,530,000	98.67
Belanja Tunjangan PPH PNS	234,992,000	118,172,293	50.29
Belanja Tunjangan Beras PNS	773,960,000	743,128,380	96.02
Belanja Uang Makan PNS	2,178,642,000	1,276,726,000	58.60
Belanja Tunjangan Umum PNS	332,035,000	319,905,000	96.35
Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	523,562,000	516,126,000	98.58
Belanja Uang Lembur	139,392,000	28,365,000	20.35
Jumlah Belanja Kotor	23,727,000,000	21,832,841,523	92.02
Pengembalian Belanja Pegawai		(13,758,198)	
Jumlah Bersih	23,727,000,000	21,819,083,325	91.96

Pengembalian Belanja senilai Rp13.758.198,00 merupakan pengembalian belanja pegawai tahun berjalan yang terdiri dari ; realisasi belanja pembulatan gaji PNS senilai Rp3.198,00 (otomatis dari aplikasi), kelebihan pembayaran Tunjangan Struktural senilai Rp1.260.000,00 karena adanya pejabat eselon III yang dilantik menjadi Atase Pertanian di Washington DC TMT 1 September 2018, Belanja Tunjangan Fungsional senilai Rp11.200.000,00 dan Belanja Tunjangan Umum PNS senilai Rp1.295.000,00.

Realisasi Belanja Pegawai (netto) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing senilai Rp21.819.083.325,00 dan Rp20.998.298.955,00.

Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Kenaikan / Penurunan	
			(Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	14,992,970,700	14,621,080,300	371,890,400	2.54
Belanja Pembulatan Gaji PNS	202,496	172,864	29,632	17.14
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	1,102,343,118	1,027,215,130	75,127,988	7.31
Belanja Tunjangan anak PNS	326,612,536	312,918,966	13,693,570	4.38
Belanja Tunjangan Struktural PNS	508,760,000	440,650,000	68,110,000	15.46
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1,899,530,000	1,608,450,000	291,080,000	18.10
Belanja Tunjangan PPH PNS	118,172,293	93,088,439	25,083,854	26.95
Belanja Tunjangan Beras PNS	743,128,380	733,351,680	9,776,700	1.33
Belanja Uang Makan PNS	1,276,726,000	1,324,503,256	(47,777,256)	(3.61)
Belanja Tunjangan Umum PNS	319,905,000	282,550,000	37,355,000	13.22
Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	516,126,000	473,320,000	42,806,000	9.04
Belanja Uang Lembur	28,365,000	87,962,000	(59,597,000)	(67.75)
Jumlah Belanja Kotor	21,832,841,523	21,005,262,635	827,578,888	3.94
Pengembalian Belanja Pegawai	(13,758,198)	(6,963,680)	6,794,518	
Jumlah Bersih	21,819,083,325	20,998,298,955	820,784,370	3.91

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp820.784.370,00 atau 3,91% dibandingkan realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan pegawai sebanyak 31 orang, kenaikan jabatan Fungsional Auditor sebanyak 27 orang, dan inpassing Auditor sebanyak 8 orang dan Pranata Humas 1 orang.

Belanja Barang Rp
67.239.511.661,00

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang (*Netto*) adalah Realisasi Belanja Barang pertanggal Laporan setelah dikurangi dengan pengembalian belanja barang.

Realisasi Belanja Barang (*Netto*) per 31 Desember 2018 adalah senilai Rp67.239.511.661,00 atau 95,30% dari Pagu Anggaran senilai Rp70.556.110,00 setelah dikurangi pengembalian belanja barang senilai Rp361.583.298,00.

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Berdasarkan Sub Kelompok Belanja per 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Keperluan Perkantoran	447,767,000	406,070,000	90.69
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	102,600,000	75,403,000	73.49
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	476,520,000	476,224,000	99.94
Belanja Bahan	1,568,348,000	1,274,736,510	81.28
Belanja Honor Output Kegiatan	93,600,000	53,850,000	57.53
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,066,254,000	963,433,949	90.36
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,376,456,000	1,351,674,705	98.20
Belanja Langganan Telepon	46,200,000	30,780,570	66.62
Belanja Sewa	327,315,000	259,736,668	79.35
Belanja Jasa Profesi	578,900,000	428,200,000	73.97
Belanja Jasa Lainnya	69,855,000	68,785,200	98.47
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	205,000,000	194,111,920	94.69
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,738,330,000	1,665,982,066	95.84
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	107,726,000	107,098,200	99.42
Belanja Perjalanan Biasa	53,019,229,000	51,846,154,931	97.79
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,126,650,000	809,500,000	71.85
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,103,060,000	3,691,591,000	89.97
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,727,300,000	3,607,378,968	96.78
Belanja Perjalanan Lainnya-Luar Negeri	375,000,000	290,383,272	77.44
Jumlah Belanja Kotor	70,556,110,000	67,601,094,959	95.81
Pengembalian Belanja Barang		(361,583,298)	
Jumlah Belanja Bersih	70,556,110,000	67,239,511,661	95.30

Pengembalian belanja barang senilai Rp361.583.298,00 adalah pengembalian belanja barang tahun berjalan yang terdiri dari; Belanja Honor Output Kegiatan senilai Rp430.200,00, Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin senilai Rp100.000,00; Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri senilai Rp294.634.202,00 yaitu; Belanja perjalanan biasa senilai Rp240.433.202,00; Belanja perjalanan dinas dalam kota senilai Rp13.750.000,00; Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota senilai Rp20.540.000,00; dan Belanja perjalanan Dinas paket meeting luar kota senilai Rp19.911.000,00, serta belanja perjalanan Luar Negeri senilai Rp66.418.896,00

Realisasi Belanja Barang (*Netto*) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp67.239.511.661,00 dan Rp62.752.985.113,00.

Perbandingan Belanja Barang

Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Kenaikan / Penurunan	
			(Rp)	%
Belanja Keperluan Perkantoran	406,070,000	602,020,810	(195,950,810)	(32.55)
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	-	63,857,924	(63,857,924)	(100.00)
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	75,403,000	68,768,500	6,634,500	9.65
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	476,224,000	298,639,500	177,584,500	59.46
Belanja Bahan	1,274,736,510	1,032,561,250	242,175,260	23.45
Belanja Honor Output Kegiatan	53,850,000	73,900,000	(20,050,000)	(27.13)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	963,433,949	1,086,755,200	(123,321,251)	(11.35)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,351,674,705	1,123,808,557	227,866,148	20.28
Belanja Langganan Telepon	30,780,570	37,598,226	(6,817,656)	(18.13)
Belanja Sewa	259,736,668	244,366,800	15,369,868	6.29
Belanja Jasa Profesi	428,200,000	483,300,000	(55,100,000)	(11.40)
Belanja Jasa Lainnya	68,785,200	-	68,785,200	-
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	194,111,920	252,256,550	(58,144,630)	(23.05)
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,665,982,066	1,646,414,163	19,567,903	1.19
Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	107,098,200	44,429,000	62,669,200	141.05
Belanja Perjalanan Biasa	51,846,154,931	47,827,215,597	4,018,939,334	8.40
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	809,500,000	625,250,000	184,250,000	29.47
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,691,591,000	3,310,829,200	380,761,800	11.50
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3,607,378,968	4,788,443,007	(1,181,064,039)	(24.66)
Belanja Perjalanan Lainnya-Luar Negeri	290,383,272	291,265,110	(881,838)	(0.30)
Jumlah Belanja Kotor	67,601,094,959	63,901,679,394	3,700,297,403	5.79
Pengembalian Belanja Baran	(361,583,298)	(1,148,694,281)	787,110,983	
Jumlah Belanja Bersih	67,239,511,661	62,752,985,113	4,486,526,548	7.15

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp4.486.526.548,00 atau 7,15% dibandingkan realisasi belanja barang per 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan karena volume kegiatan lebih besar sehingga target fisik kegiatan (output) tahun 2018 meningkat dan kenaikan satuan biaya perjalanan dinas sehingga alokasi penganggaran dan realisasi belanja barang meningkat.

Belanja Modal

Peralatan dan Mesin

Rp1.254.227.891,00

B.2.3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (*Netto*) adalah Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pertanggal Laporan setelah dikurangi dengan pengembalian belanja Modal Peralatan dan Mesin.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (*Netto*) per 31 Desember 2018 adalah senilai Rp1.254.227.891,00 atau sebesar 97,60 persen dari Pagu Anggaran senilai Rp1.285.070.000,00. Tidak terdapat pengembalian belanja modal peralatan dan mesin.

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Sub Kelompok Modal per 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,277,260,000	1,250,267,891	97.89
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	7,810,000	3,960,000	50.70
Jumlah Belanja Kotor	1,285,070,000	1,254,227,891	97.60
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Bersih	1,285,070,000	1,254,227,891	97.60

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (*Netto*) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.254.227.891,00 dan Rp1.547.089.707,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Kenaikan / Penurunan	
			(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,250,267,891	1,540,249,707	(289,981,816)	(18.83)
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	3,960,000	6,840,000	(2,880,000)	(42.11)
Jumlah Belanja Kotor	1,254,227,891	1,547,089,707	(292,861,816)	(18.93)
Pengembalian Belanja Modal	0	0	-	-
Jumlah Belanja Bersih	1,254,227,891	1,547,089,707	(292,861,816)	(18.93)

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar Rp Rp292.861.816,00 atau 18,93% dibandingkan realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2017.

Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi pengadaan belanja modal peralatan dan mesin ditahun 2018.

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp2.100.000,00

B.2.4. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (*Netto*) adalah Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pertanggal Laporan setelah dikurangi dengan pengembalian belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (*Netto*) per 31 Desember 2018 adalah Rp2.100.000,00 atau sebesar 100 persen dari Pagu Anggaran senilai Rp2.100.000,00. Tidak terdapat pengembalian belanja modal gedung dan bangunan.

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berdasarkan Sub Kelompok Modal per 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	2,100,000	2,100,000	100.00
Belanja Penambah Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	0.00
Jumlah Belanja Kotor	2,100,000	2,100,000	100.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Bersih	2,100,000	2,100,000	100.00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan (*Netto*) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp2.100.000,00 dan Rp0,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Kenaikan / Penurunan	
			(Rp)	%
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	2,100,000	-	2,100,000	0.00
Belanja Penambah Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	2,100,000	-	2,100,000	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-	-
Jumlah Belanja Bersih	2,100,000	-	2,100,000	0.00

Belanja Modal

Lainnya

Rp1.557.479.700,00

B.2.5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya (*Netto*) adalah Realisasi Belanja Modal Lainnya pertanggal Laporan setelah dikurangi dengan pengembalian belanja Modal Lainnya.

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya (*Netto*) per 31 Desember 2018 adalah Rp1.557.479.700,00 atau 99,60% dari anggaran belanja modal lainnya senilai Rp1.563.720.000,00 .

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya**Berdasarkan Sub Kelompok Modal per 31 Desember 2018**

Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Lainnya	1,563,720,000	1,557,479,700	99.60
Jumlah Belanja Kotor	1,563,720,000	1,557,479,700	99.60
Pengembalian Belanja Modal	-	-	
Jumlah Belanja Bersih	1,563,720,000	1,557,479,700	99.60

Rincian Realisasi Belanja Modal Lainnya**Per 31 Desember 2018**

No	No.SP2D	Tanggal SP2D	Nilai	Keterangan
1	181391302015515	05-04-2018	193,919,000	Rehap Ruang Kerja Irjen (Aset Tetap Renovasi)
2	181391302037657	26-06-2018	138,169,000	Rehap Ruang Kerja Sekretaris Itjen (Aset Tetap Renovasi)
3	181391303038175	24-10-2018	168,476,000	Pengadaan E-Audit Tujuan Tertentu
4	181391302088749	23-11-2018	10,000,000	Pengadaan aplikasi SIPOLISI (Sistem Pantau Online Penyelesaian LHP)
5	181391301067235	17-12-2018	48,000,000	Pengadaan Aplikasi Gratifikasi Online (E-SIGAP UPG)
6	181391302106859	19-12-2018	188,760,000	Pengadaan E-Audit
7	181391303052809	19-12-2018	163,000,200	Pengadaan E-Review Laporan Keuangan
8	181391301072589	26-12-2018	154,247,500	Pengadaan E-Review RKA-KL
9	181391301072709	26-12-2018	82,800,000	Rehap Ruang Kerja Inspektur Investigasi (Aset Tetap Renovasi)
10	181391302112364	26-12-2018	63,993,000	Rehap Ruang Kerja Studio Visual dan Editing (Aset Tetap Renovasi)
11	181391302112746	26-12-2018	176,550,000	Pengadaan E- Evaluasi
12	181391303057224	27-12-2018	169,565,000	Pengadaan E-Pengawasan
Total			1,557,479,700	

Realisasi Belanja Modal Lainnya (*Netto*) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah Rp1.557.479.700,00 dan Rp422.514.340,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2018	Realisasi 31 Desember 2017	Kenaikan / Penurunan	
			(Rp)	%
Belanja Modal Lainnya	1,557,479,700	422,514,340	1,134,965,360	268.62
Jumlah Belanja Kotor	1,557,479,700	422,514,340	1,134,965,360	268.62
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-	-
Jumlah Belanja Bersih	1,557,479,700	422,514,340	1,134,965,360	268.62

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2018 mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar Rp1.134.965.360,00 atau 268,62% dibandingkan realisasi belanja barang per 31 Desember 2017. Hal ini disebabkan karena adanya pengadaan aplikasi dibidang pengawasan dari masing-masing Inspektorat lingkup Itjentan dan Rehap Ruang Kerja yang merupakan Aset Tetap Renovasi karena Gedung B tercatat sebagai aset Gedung dan Bangunan pada neraca Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian sehingga penambahan dari ruang kerja yang direnovasi ini akan menambah nilai aset Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Aset Lancar
Rp356.023.632,00

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp356.023.632,00 dan Rp356.445.122,00 .

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan sebagai berikut :

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No	Aset Lancar	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	-	42,388,400
3	Piutang Bukan Pajak	29,439,600	
4	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Bukan Pajak	(147,198)	
5	<i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>	<i>29,292,402</i>	
6	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-	5,280,000
7	Penyisihan Piutang tidak tertagih- Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan ganti Rugi	-	(26,400)
8	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-	5,253,600
9	Persediaan	326,731,230	308,803,122
	Jumlah	356,023,632	356,445,122

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00, yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Uang Tunai di brankas Bendahara Pengeluaran	-	-
Saldo direkening Bank Mandiri a.n.BPG 139 Itjen Kementan per 31 Desember 2018	-	-
BP uang muka	-	-
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0,00

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing - masing adalah senilai Rp0,00 dan Rp42.388.400,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas selain berasal dari uang persediaan.

Pada bulan Januari 2018 saldo Kas Lainnya dan Setara Kas senilai Rp42.388.400,00 seluruhnya telah disetor ke Kas Negara dan pada realisasi anggaran tahun 2018 menjadi PNBPN. (Rincian setoran dan bukti setor terlampir).

Piutang Bukan Pajak Rp29.439.600,00

C.1.3. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing masing adalah senilai Rp29.439.600,00 dan Rp0,00 yang merupakan Hak /pengakuan pemerintah atas uang atau jasa dari entitas lain terhadap pelayanan telah diberikan pemerintah yang baru dipotong atau setorkan ke Kas Negara tahun berikutnya.

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 senilai Rp29.439.600,00 adalah merupakan kelebihan pembayaran tunjangan fungsional senilai 17.300.000,00,

tunjangan struktural senilai Rp3.780.000,00 dan sisa belanja perjalanan dinas pegawai yang dikembalikan pada tahun 2019 senilai Rp8.359.600,00 (sudah disetorkan pada bulan Januari 2019). (rincian terlampir).

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih-
Piutang Bukan
Pajak
Rp(147.198,00)*

C.1.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing senilai Rp(147.198,00) dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan estimasi ketidaktertagihan Piutang Bukan Pajak yang ditentukan oleh kualitas masing – masing piutang. Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Piutang Bukan Pajak merupakan kelebihan pembayaran perjalanan dinas 2018 dan kelebihan tersebut telah disetorkan ke Kas Negara dibulan Januari tahun 2019 dan kelebihan pembayaran tunjangan fungsional 2018 dan akan dilakukan pemotongan setiap bulan melalui potongan gaji dari PUMK Gaji. Terhadap Piutang PNPB tersebut maka Piutang dapat dikategorikan lancar dengan perhitungan 0,5 persen dari nilai Piutang. Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih piutang bukan pajak adalah sebagai berikut :

$$\text{Rp}29.439.600,00 \times 0,005 = \text{Rp}147.198,00$$

*Piutang Bukan
Pajak (Netto)
Rp29.292.402,00*

C.1.5. Piutang Bukan Pajak (Netto)

Saldo Piutang Bukan Pajak (Netto) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp29.292.402,00 dan Rp0,00 .

Piutang Bukan Pajak (Netto) adalah selisih saldo Piutang Bukan Pajak dengan saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Bukan Pajak

*Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
Rp0,00*

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing masing Rp0,00 dan Rp5.280.000,00 .

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara/ daerah wajib mengganti kerugian tersebut sejumlah kewajiban untuk menggantikan kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jangka waktunya 12 bulan.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) piutang TP/TGR kepada Pegawai limpahan dari Direktorat Jenderal PPHP yang saat ini menjadi pegawai di Inspektorat Jenderal yang dikarenakan adanya kelebihan pembayaran tunjangan fungsional oleh PUMK Gaji di PPHP, saat yang bersangkutan masih menjadi Pegawai di PPHP.

Yang bersangkutan telah melunasi seluruh kewajiban TGR melalui potongan gaji sebesar Rp440.000,00 selama 6 bulan dan sisanya dibayarkan melalui SSBP, sehingga pertanggal pelaporan akun Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi sudah nihil. (bukti setor terlampir).

Rincian Pelunasan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi

TGR Kelebihan Pembayaran Tunjangan Fungsional		Rp 21,750,000.00
3 kali angsuran yang dipotong melalui gaji oleh bendahara gaji Ditjen PPHP	Rp 1,320,000.00	
Anguran Tahun 2016 melalui potongan gaji oleh bendahara gaji Itjentan	Rp 5,280,000.00	
SPM		
Nomor	Tanggal	Potongan
00001	04-01-2016	440,000
00003	14-01-2016	440,000
00033	12-02-2016	440,000
00101	15-03-2016	440,000
00142	11-04-2016	440,000
00218	16-05-2016	440,000
00254	07-06-2016	440,000
00322	11-07-2016	440,000
00368	11-08-2016	440,000
00417	07-09-2016	440,000
00482	11-10-2016	440,000
00570	14-11-2016	440,000
Total		5,280,000
Anguran Tahun 2017 melalui potongan gaji oleh bendahara gaji Itjentan	Rp 5,280,000.00	
SPM		
Nomor	Tanggal	Potongan
00001	03-01-2017	440,000
00003	16-01-2017	440,000
00032	07-02-2017	440,000
00085	13-03-2017	440,000
00117	20-04-2017	440,000
00167	15-05-2017	440,000
00201	07-06-2017	440,000
00255	11-07-2017	440,000
00300	11-08-2017	440,000
00383	11-09-2017	440,000
00429	09-10-2017	440,000
00513	13-11-2017	440,000
Total		5,280,000
Anguran Tahun 2018 melalui potongan gaji oleh bendahara gaji Itjentan	Rp 9,870,000.00	
SPM / NTPN		
Nomor	Tanggal	Potongan
00001	02-01-2017	440,000
00003	11-01-2017	440,000
00028	09-02-2017	440,000
00073	09-03-2017	440,000
00160	09-04-2017	440,000
00225	08-05-2017	440,000
6E53A1GPOVPS28EO	25-05-2018	7,230,000
		9,870,000
Total angsuran TGR	Rp 21,750,000.00	

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih-Bagian
Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
Rp0,00

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah

masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp(26.400,00).

Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan estimasi ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi yang ditentukan oleh kualitas masing – masing piutang. Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Piutang dapat dikategorikan lancar karena pembayarannya dilakukan setiap bulan melalui potongan gaji dari PUMK Gaji.

Karena yang bersangkutan telah melunasi kewajiban terhadap TP/TGR sehingga penyisihan piutang tidak tertagih-bagian lancar tagihan TP/TGR per 31 Desember 2018 menjadi nihil.

*Bagian Lancar
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
Rp0,00*

C.1.8. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (Netto)

Saldo Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp0,00 dan Rp5.253.600,00 .

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (Netto) adalah selisih saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dengan saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).

*Persediaan
Rp326.731.230,00*

C.1.9. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 masing-masing adalah senilai Rp326.731.230,00 dan Rp308.803.122,00 .

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Kondisi atas semua jenis persediaan di atas dalam kondisi baik.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

**Rincian Persediaan
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017**

No.	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Barang Konsumsi	Rp 302,370,845	Rp 275,072,985
2	Bahan untuk Pemeliharaan	Rp -	Rp -
3	Suku Cadang	Rp -	Rp 799,000
4	Persediaan Lainnya	Rp 24,360,385	Rp 32,931,137
Jumlah		Rp 326,731,230	Rp 308,803,122

Rekapan Perhitungan Persediaan per 31 Desember 2018 yaitu sebagai berikut :

Saldo persediaan per 31 Desember 2017		308,803,122
Mutasi Tambah		1,642,751,855
Pembelian		
- Pembelian dari 5218	1,351,674,705	
- Selisih pembulatan	60	
	1,351,674,765	
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan (LO)	291,077,090	
Mutasi Kurang		(1,624,823,747)
Pemakaian		
- Beban Persediaan Konsumsi	(1,280,565,617)	
- Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	(2,025,000)	
- Beban Persediaan Suku Cadang	(2,237,600)	
- Beban Persediaan Lainnya	(207,612,313)	
	(1,492,440,530)	
Pembelian persediaan yang terhutang di tahun 2017 dan telah dibayarkan tahun 2018	(11,840,000)	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan (LO)	(106,393,217)	
Utang kepada pihak ketiga pada tahun 2017 yang dibayarkan pada tahun 2018	(14,150,000)	
Saldo Persediaan per 31 Desember 2018		326,731,230

Aset Tetap Rp
5.191.813.673,00

C.2. Aset Tetap

Nilai Aset Tetap (Netto setelah Akumulasi Penyusutan) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah senilai Rp5.191.813.673,00 dan Rp6.676.307.061,00 . Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

No	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ Penurunan
1	Peralatan dan Mesin	Rp 24,734,688,637	Rp 23,428,195,923	Rp 1,306,492,714
2	Gedung dan Bangunan	Rp 379,263,000	Rp 379,263,000	Rp -
3	Aset Tetap Lainnya	Rp 106,861,055	Rp 106,861,055	Rp -
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp -	Rp 94,545,000	Rp (94,545,000)
Jumlah		Rp 25,220,812,692	Rp 24,008,864,978	Rp 1,211,947,714
Akum. Penyusutan		Rp (20,028,999,019)	Rp (17,332,557,917)	Rp (2,696,441,102)
Nilai Buku Aset Tetap		Rp 5,191,813,673	Rp 6,676,307,061	Rp (1,484,493,388)

Peralatan dan
Mesin
Rp24.734.688.637,
00

C.2.1. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin yang dimiliki Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp24.734.688.637,00 dan Rp23.428.195.923,00 .

Mutasi nilai peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	Rp	23,428,195,923.00
Mutasi Tambah :		
- Pembelian	Rp	1,250,267,891.00
- Honor Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan		3,960,000.00
- Transfer Masuk		422,680,000.00
Mutasi Tambah	Rp	1,676,907,891.00
Mutasi Kurang :		
- Reklas ke Aset Lain-lain	Rp	338,460,177.00
- Aset Ekstrakomtabel	Rp	31,955,000.00
Mutasi Kurang	Rp	370,415,177.00
Saldo per 31 Desember 2018	Rp	24,734,688,637.00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018	Rp	(20,016,894,880.00)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	Rp	4,717,793,757.00

(Nilai buku per 31 Desember 2018 sesuai dengan nilai buku Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 pada tabel Penyusutan Aset Tetap).

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

- **Mutasi Tambah**

Mutasi Tambah senilai Rp1.676.907.891,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Mutasi tambah dari realisasi belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp1.250.267.891,00, dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2018

No.	Tanggal SPPD	No. SPPD	Nilai SPM	Jenis Belanja	Asal Perolehan	Rincian Barang	Harga Satuan	Jml	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	21/03/2018	181391303005327	42.000,000	532111	PT. Deka Sari Perkasa SPP No.00113/238247/L.S/III/2018 Tanggal 20 Maret 2018	Pengadaan Meja Rapat (Modular)	3.500,000	12	42.000,000
2	26/03/2018	181391302012530	64.715,000	532111	PT.Mandegani Nandangi Ardi SPP. No.00137/238247/GU/III/2018 Tanggal 23 Maret 2018 CV. PUTRA AMIRAS JAYA SPP. No.00137/238247/GU/III/2018 Tanggal 23 Maret 2018	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kursi besi Metal DP 304 (Ekstrakomtabel) Rak Besi	581,000 2.730,000	55 12	31.955,000 32.760,000 64.715,000
3	29/03/2018	181391303006279	68.147,200	532111	PT. DATA SCRIP SPP NO.119/238247/L.S/III/2018 TANGGAL 28 MARET 2018	Pengadaan Sarana dan Prasarana Filling Cabinet Lemari Besi/Metal	3.194,400 3.620,320	10 10	31.944,000 36.203,200 68.147,200
4	12/04/2018	181391301011291	114.180,000	532111	CV. TIGA PUTRA JAYA SPP No.00162/238247/L.S/IV/2018 Tanggal 11/04/2018	Pengadaan Meja Kerja Kayu	3.806,000	30	114.180,000
5	25/05/2018	181391302030515	84.593,000	532111	PT. BHINEKA MENTARIDIMENSI SPP No.0025/237248/LS/IV/2018 tanggal 24 Mei 2018	Pengadaan Sarana dan Prasarana System/Power Supply Lainnya Wireless Acces Point	1.150,000 7.309,300	10 10	11.500,000 73.093,000 84.593,000
6	07/06/2018	181391302035984	309.260,000	532111	PT AST RAGRAF PIA XPPRINS INDONESIA SPP No.291/238247/L.S/IV/2018 tanggal 06 Juni 2018	Pengadaan Alat Pengolah Data Personal Computer (P.C) Printer	9.800,000 1.526,000	30 10	294.000,000 15.260,000 309.260,000
7	21/09/2018	181391302065691	1.500,000	532111	SPP NO.00552/238247/GUPIX/2018 TANGGAL 26 SEPT EMBER 2018	Pengadaan Sarana dan Prasarana UPS	1.500,000	1	1.500,000
8	27/09/2018	181391302067639	15.899,000	532111	SPP NO.00553/238247/GUPIX/2018 TANGGAL 26 SEPT EMBER 2018	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lemari Kayu Wardrobe Filling Cabinet	11.600,000 4.299,000	1 1	11.600,000 4.299,000 15.899,000
9	29/10/2018	181391302078976	57.416,091	532111	SPP.NO.00622/237248/GUPIX/2018 TANGGAL 26/10/2018 - CV PUTRA AMIRAS JAYA KWITASI 13/KUIT/PAJ/9/2018 T GL 24/9/2018 - CV PUTRA AMIRAS JAYA KWITASI 11/KUIT/PAJ/9/2018 T GL 21/9/2018 - CV PUTRA TIGA PUTRA JAYA KWITASI 11/KUIT/PJ/9/2018 T GL 26/9/2018 - CV PUTRA TIGA PUTRA JAYA KWITASI 11/KUIT/PJ/9/2018 T GL 26/9/2018	Pengadaan Prasarana dan Sarana Gedung FOCUSING SCREEN/LAYAR LCD AC SPLIT 2 PK, dengan Merek : DAIKIN FT V50AXV14 DAIKIN FT V50AXV14 DAIKIN FT V50AXV14 KARPET KARPET RUMPUT SINTETIS	1.793,000 8.723,000 8.404,000 8.360,000 25.852,691 4.283,400	1 1 1 1 1 1	1.793,000 8.723,000 8.404,000 8.360,000 25.852,691 4.283,400 57.416,091

10	22/11/2018	181391302088654	70,410,000	532111	PT. MIT SINDO VISUAL PRATAMA SPP NO.680/238247/LS/XII/2018 TANGGAL 21 NOVEMBER 2018	Pengadaan Prasarana dan sarana Gedung MIC CONVERENCE (CREATOR CHARMAN UNIT CR-M4202B) MIC CONVERENCE (CREATOR DELEGATE UNIT CR-M4104B) AUDIO MASTER CONTROL UNIT (CREATOR CONTROLLER CONVERENCE UNIT CR-M4101)	5,230,000 4,150,000 19,530,000	1 11 1	5,230,000 45,650,000 19,530,000			70,410,000
11	10/12/2018	181391302097754	10,898,880	532111	PT. PERKAKASKU MULTI CEMERLANG SPP NO.00745/238247/GUP/XXII/2018 TANGGAL 05/12/2018	PROFESIONAL LASER DIGITAL (BOSCH GLM40)	1,816,480	6	10,898,880			
12	10/12/2018	181391302098782	55,360,000	532111	CV. SINAR BUANA SPP NO.00756/238247/GUP/XXII/2018 CAKRAWALA DIGITAL SPP NO.00756/238247/GUP/XXII/2018 CV. SINAR BUANA SPP NO.00756/238247/GUP/XXII/2018	Pengadaan Prasarana dan Sarana Kantor KIPAS ANGIN PERKAKAS KANTOR LAINYA (VOOTER) MEJA KURSI TAMAN	1,960,000 49,500,000 3,900,000	1 1 1	1,960,000 49,500,000 3,900,000			55,360,000
13	13/12/2018	181391303050162	219,809,220	532111	PT. ACCESS LINTAS SOLUSI SPP NO.00771/238247/LS/XXII/2018	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung MESIN FOTOCOPI (CANON IR-2535W) TELEVISI (SAMSUNG LED TV 40 INC)	95,071,110 5,933,400	2 5	190,142,220 29,667,000			219,809,220
14	13/12/2018	181391302102057	51,750,000	532111	PT. PUT RAPERASADA NUSANTARA SPP NO.762/238247/LS/XXII/2018	Pengadaan Kendaraan Roda 2 YAMAHA N-MAX 155 NON ABS VIN 2018	25,875,000	2	51,750,000			
15	14/12/2018	181391302103403	9,100,000	532111	PT. MIT SINDO VISUAL PRATAMA SPP NO.770/238247/LS/XXII/2018	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung KABEL CREAT OR EXTENTION 20 M CR-HL020 KABEL CREAT OR EXTENTION 20 M CR-HL005	5,215,000 1,295,000	1 3	5,215,000 3,885,000			9,100,000
16	17/12/2018	181391302105216	29,191,500	532111	PT. AST RAGRAPHIA XPRINGS INDONESIA SPP NO.00775/238247/LS/XXII/2018	Alat Pengolah Data dan Informasi NOTE BOOK (LENOVO NB) FOCUSING SCREEN/LAYAR LCD (DIGITAL SCREEN DIGITAL MANUAL SRCEEN)	27,800,000 1,391,500	1 1	27,800,000 1,391,500			29,191,500
17	19/12/2018	181391303052778	41,200,000	532111	CV. TUJUH SAMUDRA SPP NO.00789/238247/LS/XXII/2018	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung KURSI KERJA DONATI MANGGO 1 AL KURSI KERJA DONATI DO 19 AL	2,600,000 2,200,000	4 14	10,400,000 30,800,000			41,200,000
18	19/12/2018	181391302106842	4,838,000	532111	CV. SINAR BUANA SPP NO.00793/238247/LS/XXII/2018	Pengadaan Alata Pengolah Data LCD PROJEKTOR VIDEO SWITCHER	2,509,000 2,329,000	1 1	2,509,000 2,329,000			4,838,000
Total Pengadaan Peralatan dan Mesin TA.2018												1,250,267,891

b. Honor Panitia Pemeriksa Barang senilai Rp3.960.000,00

c. Transfer Masuk senilai Rp422.680.000,00 berupa 1 unit kendaraan bermotor roda 4 merek Honda CR-V2.0.CVT (WIN) dari Badan Karantina Pertanian .

- **Mutasi Kurang**

Mutasi Kurang senilai Rp370.415.177,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Reklas dari akun aset peralatan dan mesin ke aset lain lain senilai Rp388.460.177,00 untuk usulan penghapusan aset rusak berat ke pengelola dengan Surat Keterangan pencatatan perubahan kondisi No.B-1041/PL.320/G.1.2/4/2018 dan No.B.1395/PL.320/G.1/05/2018.

- b. Pengadaan Kursi besi Metal DP 304 sebanyak 55 unit dengan harga perunit yaitu senilai Rp581.000,00, karena pengadaan kursi besi metal tersebut perunit harganya dibawah harga kapitalisasi (peralatan dan mesin minimal Rp1.000.000,00), maka total pengadaan kursi senilai Rp31.955.000,00 tercatat pada laporan ekstrakomtabel dan tidak terinput pada Laporan Neraca per 31 Desember 2018 (Rincian Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran.)

Gedung dan
Bangunan
Rp379.263.000,00

C.2.2. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah senilai Rp379.263.000,00 dan Rp379.263.000,00 . Nilai Gedung dan Bangunan tersebut merupakan Bangunan gudang tertutup permanen milik Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Gedung dan Bangunan telah dilakukan Revaluasi pada Semester II Tahun 2017, sesuai dengan BAR IP No. 0286/WKN.07/KNL.02/2017 (terlampir) dan dicatat pada aplikasi SIMAK BMN dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Revaluasi Gedung dan Bangunan

Saldo Awal Gedung dan Bangunan sebelum Revaluasi	295,276,960
Nilai Koreksi BMN	101,702,656
Akumulasi Penyusutan Revaluasi	(17,716,616)
Saldo Gedung dan Bangunan setelah Revaluasi	379,263,000

Terdapat belanja modal upah Tenaga kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan (533121) senilai Rp2.100.000,00, untuk pengadaan rehab ruang Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian dan ruang Sekretaris Itjentan. Pengadaan rehab tersebut dilaksanakan di Gedung B Kampus Kementerian Pertanian yang merupakan aset milik Setjen Kementan sehingga pembebanan mata anggaran untuk rehab bangunan tersebut tidak sesuai, seharusnya menggunakan mata anggaran Belanja Modal

Lainnya (536111).

(Nilai buku per 31 Desember 2018 sesuai dengan nilai buku Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 tabel Penyusutan Aset Tetap).

(Rincian Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran)

Aset Tetap Lainnya
Rp106.861.055,00

C.2.3. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp106.861.055,00 dan Rp106.861.055,00.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	Rp	106,861,055.00
Mutasi Tambah :		
- Pengadaan Renovasi ruang kerja gedung B	Rp	478,881,000.00
- Honor panitia pemeriksa barang		2,100,000.00
Mutasi Tambah	Rp	480,981,000.00
Mutasi Kurang :	Rp	
- Transfer Keluar ke Setjen Kementan	Rp	480,981,000.00
Mutasi Kurang	Rp	480,981,000.00
Saldo per 31 Desember 2018	Rp	106,861,055.00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2018	Rp	106,861,055.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

- **Mutasi Tambah**

Mutasi Tambah senilai Rp480.981.000,00 merupakan pengadaan renovasi ruang kerja gedung B (ATR) senilai Rp478.881.000,00 dan honor panitia pemeriksa barang senilai Rp2.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya

Per 31 Desember 2018

No	Keterangan	Pengadaan		Honor		Jumlah
		No.SP2D	Nilai	No.SP2D	Nilai	
1	Rehap Ruang Kerja Irjen (Aset Tetap Renovasi)	181391302015515	193,919,000	181391302030935	420,000	194,339,000
2	Rehap Ruang Kerja Sekretaris Itjen (Aset Tetap Renovasi)	181391302037657	138,169,000	181391701004088	1,260,000	139,429,000
3	Rehap Ruang Kerja Inspektur Investigasi (Aset Tetap Renovasi)	181391301072709	82,800,000	-	-	82,800,000
4	Rehap Ruang Kerja Studio Visual dan Editing (Aset Tetap Renovasi)	181391302112364	63,993,000	181391701004088	420,000	64,413,000
Total			478,881,000		2,100,000	480,981,000

- Mutasi Keluar

Mutasi keluar senilai Rp480.981.000,00 merupakan transfer keluar ke Setjen Kementan karena pencatatan aset Gedung B ada pada Neraca Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian sehingga nilai tambah dari renovasi ruang kerja tersebut ditransfer keluar untuk dicatat pada pembukuan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0,00

C.2.4. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp94.545.000,00 . Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan jasa konsultan perencana rehab Gedung B Lantai II dan III. Penyelesaian KDP tidak dilanjutkan atau dihentikan selamanya karena keterbatasan dan anggaran tidak dialokasikan lagi di Tahun 2017. Akun KDP telah dilakukan penghentian dari penggunaannya/penghapusan dengan surat Pernyataan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian No.B-2495-1/PL-320/G/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017 dan surat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian No.B-317/PL.320/G.1/01/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal

Permohonan Persetujuan Penghapusan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sehingga akun KDP senilai Rp Rp94.545.000,00 telah keluar dari daftar buku di Kuasa Pengguna Barang.

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp(20.028.999.019,
00)

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing Rp(20.028.999.019,00) dan Rp(17.332.557.917,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 disajikan sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2018

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	24,734,688,637	20,016,894,880	4,717,793,757
2	Gedung dan Bangunan	379,263,000	12,104,139	367,158,861
3	Aset Tetap Lainnya	106,861,055	-	106,861,055
Jumlah		25,220,812,692	20,028,999,019	5,191,813,673

Piutang Jangka
Panjang Rp0,00

C.3. Piutang Jangka Panjang

Saldo Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp4.567.050,00 .

Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2018 merupakan Piutang Tagihan TP/TGR untuk Tuntutan Ganti Rugi disebabkan adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih atas tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan

yang berlaku karena adanya kerugian negara.

Rincian Piutang Jangka Panjang pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan sebagai berikut :

**Rincian Piutang Jangka Panjang
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017**

No	Piutang Jangka Panjang	31 Desember 2018	31 Desember 2017
1	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi	-	4,590,000
2	Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	-	(22,950)
3	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	-	4,567,050
Jumlah		-	4,567,050

*Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
Rp0,00*

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp4.590.000,00.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) adalah tagihan kepada Bendahara akibat kelalaian atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Yang bersangkutan telah mempertanggungjawabkan seluruh kewajiban TGR nya melalui potongan gaji sebesar Rp440.000,00 selama 6 bulan dan sisanya dibayarkan melalui SSBP. (bukti setor terlampir).

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih -
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
Rp0,00

C.3.2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp(22.950,00)

Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan estimasi ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi yang ditentukan oleh kualitas masing – masing piutang. Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode.

Yang bersangkutan telah melunasi tanggung jawabnya sehingga penyisihan piutangnya pun nihil.

Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(Netto) Rp0,00

C.3.3. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (Netto)

Saldo Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp0,00 dan Rp4.567.050,00 .

Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (Netto) adalah selisih saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dengan saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Tuntutan Perbendaharaan /Tuntutan Ganti Rugi.

Aset Lainnya
Rp1.219.596.573,
00

C.4. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya (Netto setelah Akumulasi Penyusutan/Amortisasi) pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp1.219.596.573,00 dan Rp404.953.797,00 .

Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

**Rincian Aset Lainnya
per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017**

No	Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan/ Penurunan
1	Aset Tak Berwujud	Rp 1,669,608,040	Rp 591,009,340	Rp 1,078,598,700
	Aset Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -
3	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	Rp (450,011,467)	Rp (186,055,543)	Rp (263,955,924)
	Nilai Buku Aset Lainnya	Rp 1,219,596,573	Rp 404,953,797	Rp 814,642,776

Aset Tak Berwujud
Rp1.669.608.040
,00

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp1.669.608.040,00 dan Rp591.009.340,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Mutasi nilai Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	Rp	591,009,340.00
Mutasi Tambah :		
- Aset Tak Berwujud	Rp	1,078,598,700.00
Mutasi Tambah	Rp	1,078,598,700.00
Mutasi Kurang :	Rp	-
Mutasi Kurang	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2018	Rp	1,669,608,040.00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018	Rp	(450,011,467.00)
Nilai Buku per 31 Desember 2018	Rp	1,219,596,573.00

Rincian Aset Tak Berwujud Tahun per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tak Berwujud

Per 31 Desember 2018

NO	URAIAN	TAHUN	NILAI	
1	Software Knowledge Management (Website Itjentan)	2008	Rp	39,985,000
2	Aplikasi Digital Signnage	2015	Rp	15,550,000
3	Pengembangan Website Itjentan	2015	Rp	34,500,000
4	Pengadaan Dashboard Itjentan	2015	Rp	29,500,000
5	Pengadaan System Informasi Pengawasan	2015	Rp	48,960,000
6	Pengadaan System Informasi Pengawasan	2017	Rp	356,958,470
7	Pengadaan System Informasi Pemantauan Kinerja	2017	Rp	15,780,000
8	Pengadaan System Informasi E-Reviu Dokumen	2017	Rp	49,775,870
9	Pengadaan Aplikasi E-Audit Tujuan Tertentu	2018	Rp	168,476,000
10	Pengadaan Aplikasi SIPOLISI (Sistem Pantau Online Penyelesaian LHP	2018	Rp	10,000,000
11	Pengadaan Aplikasi Gratifikasi Online (E-SIGAP UPG)	2018	Rp	48,000,000
12	Pengadaan Aplikasi E-Audit	2018	Rp	188,760,000
13	Pengadaan Aplikasi E-Reviu Laporan Keuangan	2018	Rp	163,000,200
14	Pengadaan Aplikasi E-Reviu RKA-KL	2018	Rp	154,247,500
15	Pengadaan Aplikasi E-Evaluasi	2018	Rp	176,550,000
16	Pengadaan Aplikasi E-Pengawalan	2018	Rp	169,565,000
	Total		Rp	1,669,608,040

Aset Lain-lain
Rp0,00

C.4.2.Aset Lain-Lain

Nilai Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Mutasi nilai Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	Rp	-
Mutasi Tambah :		
- aset peralatan dan mesin rusak berat	Rp	338,460,177.00
Mutasi Tambah	Rp	338,460,177.00
Mutasi Kurang :	Rp	
- Penghapusan	Rp	338,460,177.00
Mutasi Kurang	Rp	338,460,177.00
Saldo per 31 Desember 2018	Rp	-
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2018	Rp	-

aset peralatan dan mesin yang kondisinya rusak berat sebanyak 129 unit senilai Rp338.460.177,00 yang dicatat sebagai aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah dan pada bulan Desember 2018 dilakukan penghapusan dari daftar barang.

Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(450.011.467,00)

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah Rp(450.011.467,00) dan Rp(186.055.543,00) .

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2018

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Aklm. Penyusutan	Nilai Buku
Software	Rp 1,669,608,040	Rp 450,011,467	Rp 1,219,596,573
Aset Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -
Total	Rp 1,669,608,040	Rp 450,011,467	Rp 1,219,596,573

Kewajiban Jangka
Pendek
Rp374.005.132,00

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 tersaji sebesar Rp374.005.132,00 dan Rp14.150.000,00.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 disajikan sebagai berikut :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2017	31 Desember 2017
Utang Kepada Pihak Ketiga	Rp 374,005,132	Rp 14,150,000
Uang Muka dari KPPN	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp 374,005,132	Rp 14,150,000

Utang Kepada Pihak
Ketiga
Rp374.005.132,00

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 tersaji sebesar Rp374.005.132,00 dan Rp14.150.000,00.

Utang kepada pihak ketiga adalah kontrak atau perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2018 senilai Rp374.005.132,00 merupakan kekurangan belanja pegawai senilai Rp81.221.400,00 dan belanja barang senilai Rp292.783.732,00, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

Per 31 Desember 2018

NO	URAIAN	NILAI
1	Kekurangan pembayaran gaji pegawai karena Kenaikan Pangkat	Rp 5,714,600
2	Kekurangan pembayaran tunjangan struktural	Rp 4,300,000
3	Pembayaran uang makan pegawai bulan Desember 2018	Rp 71,206,800
4	Pemakaian Telepon bulan Desember 2018 (sudah dibayar bulan Januari 2019)	Rp 1,721,933
5	Kekurangan pembayaran perjalanan dinas Biasa	Rp 288,661,799
6	Kekurangan pembayaran perjalanan dinas dalam kota	Rp 2,400,000
	Total	Rp 374,005,132

(dokumen sumber dilampirkan pada lampiran).

Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2017 senilai Rp14.150.000,00 merupakan pengadaan ATK tahun 2017 yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan kepada pihak rekanan yaitu CV. Sinar Buana senilai Rp14.150.000,00. Utang tersebut telah dibayarkan bulan Januari 2018. (Faktur Pembayaran terlampir).

Rincian pembayaran hutang kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut :

**Rincian Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2018**

No	SP2D			SPTB	
	Tanggal	Nomor	Jumlah	Nomor	Jumlah
1	19-02-2018	181391302003319	57,579,240	612	6,600,000
2	23-02-2018	181391302004653	136,865,000	613	7,550,000
Total					14,150,000

Uang Muka dari
KPPN Rp0,00

C.5.2. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 tersaji sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan oleh KPPN Jakarta V sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal Pelaporan.

Kas dibendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 adalah Rp0,00 sehingga saldo uang muka dari KPPN per 31 Desember 2018 juga nihil.

Ekuitas
Rp6.393.428.746,00

C.6. EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 adalah masing-masing senilai Rp6.393.428.746,00 dan Rp7.428.123.030,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).